

RENCANA STRATEGIS

2018 - 2023

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMANDAU**

Jalan Bukit Hibul Utara No. 50
Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau
Provinsi Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kab.Lamandau Tahun 2019 Nomor 230, dokumen tersebut sebagai acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten lamandau untuk kurun waktu tahun 2018 - 2023, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Melalui kesempatan ini kami mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Kabupaten Lamandau “*Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius Dan Aman)*”.

Semoga upaya kita mendapatkan ridha dan hidayah-Nya. Amin.

Nanga Bulik, 22 April 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau

FRIARAIYATINI, SKM, M. Kes
NIP. 19700430 199401 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kesehatan	10
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	20
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan	41

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	58
LAMPIRAN	
- Formulatorium Perhitungan Indikator	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

2.1	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	16
2.2	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau berdasarkan Pendidikan Tahun 2018	17
2.3	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan Eselonisasi dan Pelaksana Tahun 2018	18
2.4	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2018	18
2.5	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Berdasarkan Profesi Tahun 2018	19
2.6a	Jumlah Sarana Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018	19
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2014 – 2018	21
2.7	Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 – 2018	23
2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2014 - 2018	24
3.1	Hubungan Antara Masalah Kesehatan dan Determinan Kesehatan	33
3.2	Tema, Tujuan dan Isu / Permasalahan Terkait dalam KLHS RPJMD 2018	38
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023	44
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	46
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 -2023	50
7.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra OPD ini menjadi bagian landasan dalam pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di Kabupaten Lamandau.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional yang dituangkan dalam *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015 -2030 sebagai pengganti *Millenium Development Goals* (MDGs). Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Terdapat 38 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani diantaranya yaitu upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka

kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, Malaria serta peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB), terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatian, yaitu: 1) Kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); 2) Penyalahgunaan narkoba dan alkohol; 3) Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; 4) Universal Health Coverage; 5) Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Proses penyusunan Renstra OPD didasarkan kepada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara kontekstual dan substantive dalam mekanisme perencanaan. Renstra OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat dan Kabupaten dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan *Sustainable Development Goals*(SDGs) serta mempertimbangkan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2018 – 2023 yang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang yang dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 bahwa Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tersebut sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan serta dilaksanakan oleh seluruh stakeholders jajaran kesehatan baik di Pusat maupun Daerah termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha.

Selain itu, keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adanya upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan (baik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lamandau) yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya didalam satu Visi Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu *“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Dan Harmonis)”*.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. RPJMD tersebut akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau ini sehingga pembangunan bidang kesehatan untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati / Wakil Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut.

Untuk keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya. Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) tersebutlah inilah disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat rencana program, kegiatan dan uraian pendanaan secara lengkap yang pada akhirnya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

1.2 LANDASAN HUKUM

RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau tahun 2018 – 2023 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

- A. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- B. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- C. Landasan Operasional sebagai berikut :
 - 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 230);
27. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dan
28. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu lima tahun dan sebagai penjabaran kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023.

1.3.2. Tujuan Perubahan RENSTRA

Adapun tujuan dibuatnya Rencana Strategis ini adalah

- a) Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
- b) Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan.
- c) Sebagai tolak ukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
- d) Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- e) Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- f) Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan.
- g) Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII. Penutup

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192); dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Lamandau dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

- b.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang terdiri dari :

c. 1. Bidang Kesehatan Masyarakat, dengan 3 (tiga) seksi yaitu

- C.1.1 Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi;
- C.1.2 Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- C.1.3 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan/Olah Raga.

c. 2. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, dengan 3 (tiga) seksi yaitu

- c.2.1. Seksi Surveilans Dan Imunisasi;
- c.2.2. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c.2.3. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- c. 3. **Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan**, dengan 3 (tiga) seksi yaitu
 - c.3.1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - c.3.2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - c.3.3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- d. Kolompok Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada babupaten. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau meyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Subbag dan Seksi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau sebagai berikut

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program, kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi, dan pembukuan, administrasi perbendaharaan serta melakukan pengelolaan sarana, perbekalan, perlengkapan, pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, tata surat dan tata kearsipan, urusan dalam, pemeliharaan perkantoran dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta menghimpun ketentuan perundang-undangan berkait dengan dinas kesehatan.

e. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

f. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi.

g. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

h. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga

Seksi Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Ragam mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

i. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

j. Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

k. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

l. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

m. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

n. Seksi Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional.

o. Seksi Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Seksi Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).

p. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

q. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan-kegiatan teknis yang berkaitan dengan kegiatan operasional dilapangan dalam rangka meningkatkan pelayanan terpadu dengan instansi teknis lainnya maupun peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

yang terdiri dari UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut

a) Puskesmas mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

i. Tugas :

Melaksanakan tugas teknis pelayanan kesehatan di kecamatan sesuai petunjuk/pedoman/data informasi/ peraturan perundangundangan.

ii. Fungsi :

1. Melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan;
2. Mengatur dan memberi petunjuk teknis penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan kesehatan;
3. Membina penyelenggaraan ketatausahaan pada UPTD;
4. Puskesmas Merencanakan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
5. Mengkoordinasikan tenaga teknis dan fungsional UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
6. Membina kerja sama dengan pihak lain dalam rangka;
7. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan;
8. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada UPTD;
9. Membagi tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada atasan.

b) Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

i. Tugas

Melaksanakan Pelayanan Laboratorium kesehatan mencakup Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesmas melalui kegiatan pemeriksaan Laboratorium.

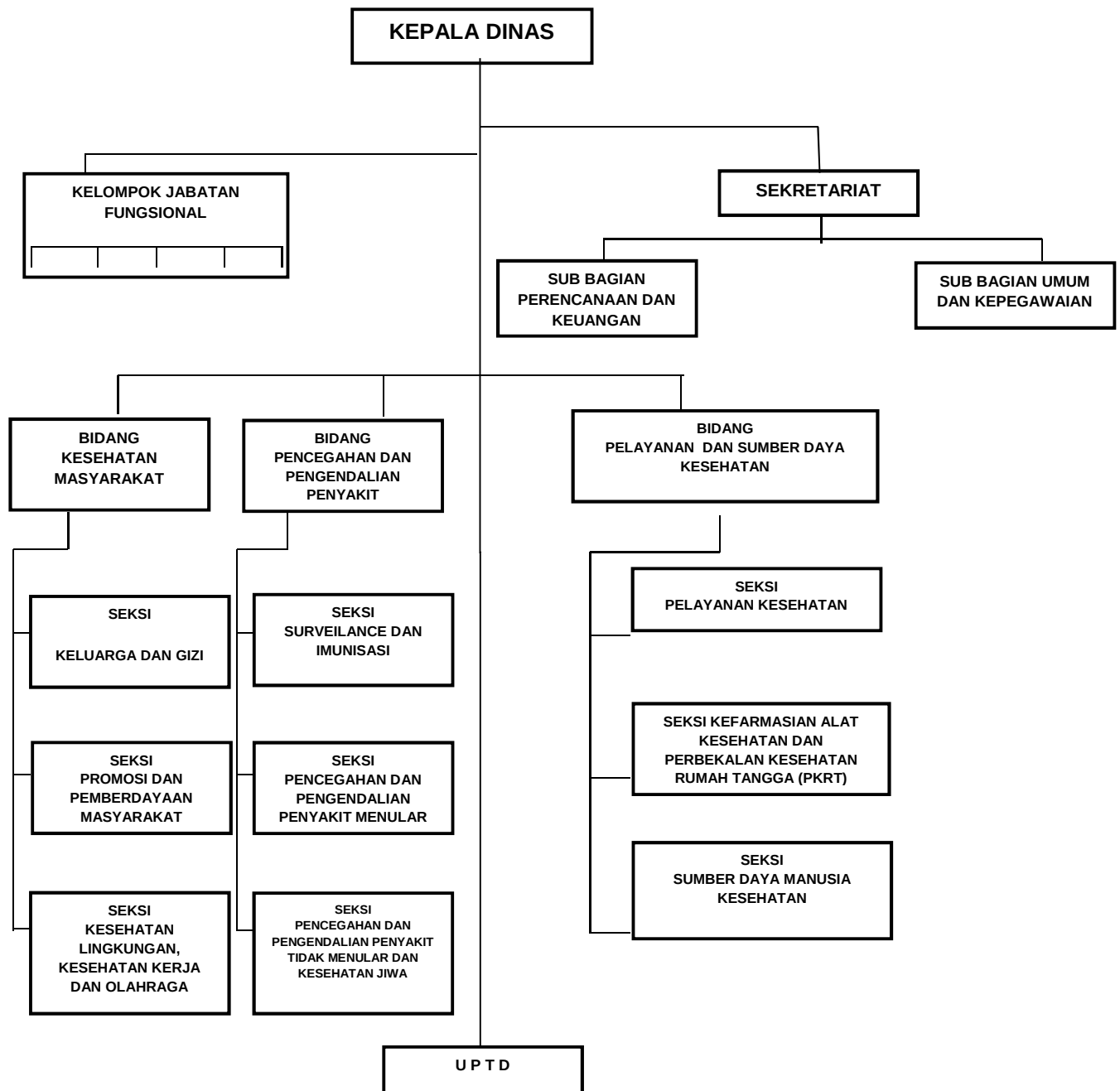
ii. Fungsi

- Pelaksanaan pemeriksaan Mikrobiologi;
- Pelaksanaan Pemeriksaan pelayanan Laboratorium Klinik dan Imunologi;
- Pelaksanaan pemeriksaan Kimia kesehatan.

Untuk struktur organisasi Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU



2.2. SUMBER DAYA KESEHATAN

Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan pola dan manajemen upaya kesehatan dibutuhkan sumber daya yang memadai. Upaya kesehatan dapat berdayaguna dan berhasilguna bila kebutuhan sumber daya tenaga, biaya dan sarana kesehatan terpenuhi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Kabupaten Lamandau dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD / MI	0
2	SMP / MTs	4
3	SMA / MA	53
4	SMK	2
5	D-3	227
6	S-1	71
7	S-2	8
8	S-3	0
JUMLAH		365

Sumber : Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan
berdasarkan Eselonisasi dan Pelaksana Tahun 2018

No	Eselon	Jenis Pendidikan								JML
		SD / MI	SMP / MTs	SMA / MA	SMK	D-3	S-1	S-2	S-3	
1	II	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	III	0	0	0	0	0	3	1	0	4
3	IV	0	0	0	0	7	11	4	0	22
4	Pelaksana	0	4	53	2	220	57	2	0	338
TOTAL		0	4	53	2	227	71	8	0	365

Sumber : Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2018

No	Golongan	Jumlah
1	IV / d	0
2	IV / c	0
3	IV / b	0
4	IV / a	7
5	III / d	19
6	III / c	44
7	III / b	74
8	III / a	107
9	II / d	65
10	II / c	45
11	II / b	3
12	II / a	0
13	I / d	1
14	I / c	0
15	I / b	0
16	I / a	0

Sumber : Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
Berdasarkan Profesi Tahun 2018

No	Jenis Pegawai Fungsional	Kategori		Jumlah
		PNS	THL	
1.	Dokter Umum	11	2	13
2.	Dokter gigi	2	0	2
3.	Apoteker	5	1	6
4.	Asisten apoteker	7	2	9
5.	Perawat	154	45	199
6.	Bidan	92	47	139
7.	Nutrisionis	21	5	26
8.	Sanitarian	7	0	7
9.	Perawat gigi	11	1	12
10.	Analisis kesehatan	6	2	8
	TOTAL	316	105	421

Sumber : Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan diuraikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.6a
Jumlah Sarana Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018

No	Nama Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Puskesmas	11 unit	
2	Puskesmas Pembantu	73 unit	
3	Poskesdes	52 unit	
4	Posyandu Pratama	59 unit	
5	Posyandu Pratama Madya	10 unit	
6	Posyandu Pratama Purnama	1 unit	

Sumber : Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Dinas Kesehatan dalam hal pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat mempunyai beberapa Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2014 - 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Target NSPK	Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2017	2016	2015	2014	2018	2017	2016	2015	2014
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH		501,79	306,513	74,9625	368	265	20,33	33,28	136,07	27,72	38,49
	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH		19,1235	6,9	11,2	1,49	15,1	88,90	246,38	156,25	1187,92	117,22
	Usia Harapan Hidup		69,28	69,28	69,2	69,12	67,36	98,59	98,30	98,12	97,95	100,21
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar											
	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	85	83	85,7	84,9	86,1	91	97,6	100,8	99,9	101,3	107,1
	2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	100	100	33,3	100	100	100	100	33,3	100,0	100,0	100,0
	3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80	68,52	81,6	50,21	84,7	90	85,65	102,0	62,8	105,9	112,5
	4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas	80	84	76,9	84	84,4	90	105	96,1	105,0	105,5	112,5
	5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	7,08	32,9	32,9	19,5	30,6	8,85	41,1	41,1	24,4	38,3
	6. Cakupan kunjungan bayi.	90	97,28	83,36	56,4	64,04	94,5	108,0889	92,6	62,7	71,2	105,0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Target NSPK	Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2017	2016	2015	2014	2018	2017	2016	2015	2014
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	90	94,31	93,12	91,67	69,3	89,1	104,8	103,5	101,9	77,0	99,0
	8. Cakupan pelayanan anak balita.	90	85	52,1	69,5	103	52,6	94,4	57,9	77,2	114,4	58,4
	9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	90	100	99,7	100	100	99,4	111,1	110,8	111,1	111,1	110,4
	12. Cakupan peserta KB Aktif	60	31,8	46,3	71,2	75,4	69,9	53	77,2	118,7	125,7	116,5
	13. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit											
	a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	2	1	1	1	0	0	50	50,0	50,0	0,0	0,0
	b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Target NSPK	Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2017	2016	2015	2014	2018	2017	2016	2015	2014
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	d. Penderita DBD yang Ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	e. Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0
	f. Usia Harapan Hidup	67,45										
	14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	52,5	56,4	15,01	11,6	44,01	52,5	56,4	15,0	11,6	44,0
2.	Pelayanan kesehatan rujukan											
	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Penyelidikan											
	17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Promosi											
	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	80	73,86	77,7	96	96	100	92,325	97,1	120,0	120,0	125,0

Dari tabel diatas, beberapa target indikator kinerja yang telah sesuai dengan target kinerja Renstra periode yang lalu (Renstra Tahun 2013 – 2018) antara lain cakupan kunjungan ibu hamil k4, cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. Namun masih ada juga beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target antara lain realisasi angka kematian ibu 519,79 per 100.000 KH dengan target 102 per 100.000 KH dan realisasi cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 52,5% dengan target sebesar 100%.

Selain pencapaian indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2014 -2018 akan disampaikan pula mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau berdasarkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. Gambaran kinerja pelayanan dan Kinerja Keuangan Dinas kesehatan Kabupaten Lamandau tahun 2014 – 2018 dengan rincian realisasi sebagai berikut

Tabel 2.7
Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
Tahun Anggaran 2014 – 2018

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN				
		2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
1	Belanja Daerah	35.953.871.181	42.795.036.822	43.515.348.994	47.362.882.115	53.644.029.179
2	Belanja Tidak Langsung	15.398.789.745	19.398.890.209	23.699.575.456	26.042.849.501	26.642.542.379
3	Belanja Langsung	20.555.081.436	23.396.146.613	19.815.773.538	21.320.032.614	27.001.486.800

Uraian anggaran dan realisasi keuangan pada masing-masing program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau

Uraian		Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2017	2016	2015	2014	2018	2017	2015	2014		1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Kesehatan:																		
BELANJA		Rp 63.123.223.791	Rp 56.806.043.705	Rp 51.323.143.891	Rp 48.181.111.158	Rp 41.287.075.282	Rp 53.644.029.179	Rp 47.362.882.115	Rp 43.515.348.994	Rp 42.795.036.822	Rp 35.953.871.181	87,08	88,82	84,79	83,38	84,98	11,26	7,08
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 29.691.543.703	Rp 27.124.587.791	Rp 25.213.310.982	Rp 20.344.930.314	Rp 17.412.942.046	Rp 26.642.542.379	Rp 26.042.849.501	Rp 23.699.575.456	Rp 19.398.890.209	Rp 15.398.789.745	88,43	95,35	94,00	96,01	89,73		
B.	BELANJA LANGSUNG	Rp 33.431.680.088	Rp 29.681.455.914	Rp 26.109.832.909	Rp 27.836.180.844	Rp 23.874.133.236	Rp 27.001.486.800	Rp 21.320.032.614	Rp 19.815.773.538	Rp 23.396.146.613	Rp 20.555.081.436	86,10	84,05	75,89	71,83	80,77		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 4.258.636.670	Rp 3.850.052.072	Rp 2.912.526.170	Rp 2.850.580.819	Rp 3.748.270.979	Rp 4.039.338.010	Rp 3.622.512.913	Rp 2.816.716.546	Rp 2.208.066.359	Rp 2.633.838.252	70,27	77,46	96,71	94,09	94,85		
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 13.800.000	Rp 13.800.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 13.800.000							
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 144.425.000	Rp 180.861.800	Rp 293.972.200	Rp 373.825.000	Rp 160.770.000	Rp 128.215.566	Rp 144.467.309	Rp 252.456.029	Rp 190.595.846	Rp 141.241.629							
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 241.613.545	Rp 253.649.843	Rp 331.255.241	Rp 356.255.241	Rp 267.500.000	Rp 237.363.247	Rp 241.063.386	Rp 309.532.341	Rp 332.960.220	Rp 218.202.900							
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 3.094.940.000	Rp 2.586.143.000	Rp 1.314.250.000	Rp 1.131.399.850	Rp 2.566.286.400	Rp 2.897.847.610	Rp 2.411.042.000	Rp 1.293.360.000	Rp 764.617.001	Rp 1.610.642.000							
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 96.600.000	Rp 92.376.000	Rp 85.001.050	Rp 60.048.049	Rp 61.512.000	Rp 96.599.000	Rp 92.375.000	Rp 84.998.000	Rp 48.296.500	Rp 50.289.800							
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 33.713.125	Rp 47.888.125	Rp 62.374.375	Rp 62.374.375	Rp 62.374.375	Rp 33.713.125	Rp 47.886.875	Rp 62.373.300	Rp 62.371.625	Rp 61.277.425							
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 20.250.000	Rp 31.250.000	Rp 41.750.000	Rp 41.750.000	Rp 47.499.900	Rp 20.250.000	Rp 31.237.500	Rp 41.750.000	Rp 41.540.000	Rp 47.244.800							
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 6.550.000	Rp 6.550.000	Rp 6.550.000	Rp 116.550.000	Rp 6.550.000	Rp 6.550.000	Rp 6.529.000	Rp 4.877.500	Rp 71.838.000	Rp 6.550.000							
1.9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp -	Rp -	Rp 2.990.000	Rp 2.990.000	Rp 2.400.000	Rp -	Rp -	Rp 2.780.000	Rp 1.700.000	Rp 2.400.000							
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 15.000.000	Rp 16.658.304	Rp 16.658.304	Rp 16.658.304	Rp 16.658.304	Rp 14.760.000	Rp 13.891.200	Rp 14.820.000	Rp 14.758.920	Rp 10.110.000							
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 43.750.000	Rp 43.750.000	Rp 43.750.000	Rp 52.154.000	Rp 52.484.000	Rp 38.240.000	Rp 42.900.000	Rp 25.619.000							
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 415.995.000	Rp 380.675.000	Rp 418.775.000	Rp 376.820.000	Rp 299.670.000	Rp 415.080.462	Rp 380.661.643	Rp 418.774.376	Rp 376.314.747	Rp 293.505.698							
1.13	Rapat dan koordinasi dalam daerah	Rp 131.050.000	Rp 195.500.000	Rp 289.200.000	Rp 254.360.000	Rp 199.500.000	Rp 130.855.000	Rp 194.875.000	Rp 286.755.000	Rp 254.173.500	Rp 152.955.000							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 309.061.577	Rp 570.127.085	Rp 563.084.294	Rp 1.122.515.000	Rp 2.268.798.225	Rp 294.375.735	Rp 519.847.440	Rp 539.532.500	Rp 1.047.631.660	Rp 2.175.254.500	95,88	93,33	95,82	91,18	95,25		
2.1	Pembangunan gedung kantor	Rp -	Rp -	Rp 174.500.000	Rp -	Rp 974.845.000	Rp -	Rp 159.276.500	Rp 159.276.500	Rp -	Rp 961.806.000							
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 118.911.577	Rp 122.000.000	Rp 15.000.000	Rp 723.015.000	Rp 905.572.500	Rp 114.460.000	Rp 116.412.440	Rp 10.000.000	Rp 658.521.000	Rp 831.663.500							
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 190.150.000	Rp 208.127.085	Rp 114.984.294	Rp 100.500.000	Rp 95.780.725	Rp 179.915.735	Rp 178.975.000	Rp 113.981.000	Rp 96.459.000	Rp 93.229.000							
2.4	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Rp 240.000.000	Rp 258.600.000	Rp 299.000.000	Rp 292.600.000		Rp 224.460.000	Rp 256.275.000	Rp 292.651.660	Rp 288.556.000							
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 65.000.000	Rp 30.000.000	Rp 135.565.000	Rp 217.733.250	Rp 43.085.000	Rp 64.032.803	Rp 28.450.000	Rp 105.845.500	Rp 195.357.675	Rp 17.000.000	39,46	89,72	78,08	94,83	98,51		
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 65.000.000	Rp 30.000.000	Rp 135.565.000	Rp 217.733.250	Rp 43.085.000	Rp 64.032.803	Rp 28.450.000	Rp 105.845.500	Rp 195.357.675	Rp 17.000.000							
4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 4.629.086.000	Rp 3.585.171.001	Rp 3.359.856.700	Rp 2.617.030.000	Rp 2.738.635.066	Rp 4.340.728.503	Rp 3.468.284.928	Rp 3.179.845.626	Rp 2.564.464.007	Rp 2.485.528.087	90,76	97,99	94,64	96,74	93,77		
4.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 4.629.086.000	Rp 3.585.171.001	Rp 3.359.856.700	Rp 2.617.030.000	Rp 2.738.635.066	Rp 4.340.728.503	Rp 3.468.284.928	Rp 3.179.845.626	Rp 2.564.464.007	Rp 2.485.528.087							
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 8.140.560.750	Rp 6.309.347.750	Rp 6.402.886.092	Rp 5.019.025.870	Rp 3.051.329.019	Rp 6.483.548.530	Rp 5.537.657.120	Rp 2.570.861.786	Rp 2.293.554.163	Rp 1.963.841.288	64,36	45,70	40,15	87,77	79,64		
5.1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Rp 1.348.716.000	Rp 1.257.880.000	Rp 1.157.690.000	Rp 1.093.190.370	Rp 525.446.000	Rp 1.247.779.700	Rp 1.118.936.000	Rp 1.055.351.000	Rp 866.069.550	Rp 318.490.875							
5.2	Pengelolaan penyakit menular	Rp 95.495.000	Rp 160.500.000	Rp 179.957.853	Rp 196.600.000	Rp 97.000.000	Rp 90.113.875	Rp 137.380.000	Rp 163.426.500	Rp 159.107.000	Rp 61.790.250							
5.3	PM2. Bidang Kesehatan	Rp -	Rp -	Rp 33.080.000	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000			Rp 32.856.500	Rp 34.887.000	Rp 34.786.000							
5.4	Pengelolaan Program Akas PHS	Rp -	Rp -	-		Rp -					Rp -							
5.5	Penilaian tenaga kesehatan terdapat	Rp 40.388.750	Rp 40.388.750	Rp 31.830.000	Rp 28.325.000	Rp 28.325.000	Rp 40.176.250	Rp 39.534.950	Rp 30.424.600	Rp 25.227.000	Rp 20.923.000							
5.6	Operasional Gudang Farmasi	Rp 76.460.000	Rp 61.560.000	Rp 41.560.000	Rp 54.120.000	Rp 44.100.000	Rp 73.782.900	Rp 60.780.500	Rp 41.459.000	Rp 51.028.250	Rp 40.800.900							
5.7	Operasional Puskesmas Buluk	Rp 498.500.000	Rp 387.500.000	Rp 1.193.164.450	Rp 652.600.000	Rp 457.919.250	Rp 447.703.000	Rp 339.725.000	Rp 81.157.935	Rp 80.087.280	Rp 269.832.602							
5.8	Operasional Puskesmas Sematu	Rp 525.000.000	Rp 359.903.000	Rp 432.144.800	Rp 273.002.000	Rp 179.177.000	Rp 488.537.900	Rp 347.206.100	Rp 79.387.000	Rp 84.217.728	Rp 109.984.760							
5.9	Operasional Puskesmas Delang	Rp 516.000.000	Rp 412.500.000	Rp 482.706.824	Rp 482.500.000	Rp 298.095.525	Rp 365.750.200	Rp 324.759.000	Rp 75.548.000	Rp 87.161.000	Rp 143.390.900							
5.10	Operasional Puskesmas Tapin Bini	Rp 726.000.000	Rp 387.500.000	Rp 368.317.117	Rp 234.950.000	Rp 145.063.920	Rp 387.072.375	Rp 285.760.700	Rp 47.860.000	Rp 51.305.000	Rp 82.661.903							
5.11	Operasional Puskesmas Kinipan	Rp 541.000.000	Rp 427.500.000	Rp 209.599.475	Rp 161.280.000	Rp 121.500.750	Rp 414.848.400	Rp 342.270.500	Rp 56.170.000	Rp 67.300.000	Rp 82.374.125							
5.12	Operasional Puskesmas Bayat	Rp 827.500.000	Rp 427.500.000	Rp 231.464.523	Rp 246.452.500	Rp 193.727.624	Rp 523.204.100	Rp 399.802.850	Rp 69.214.500	Rp 74.544.500	Rp 114.538.375							
5.13	Operasional Puskesmas Merambang	Rp 531.000.000	Rp 427.500.000	Rp 246.770.575	Rp 220.075.000	Rp 125.603.000	Rp 419.520.000	Rp 422.485.000	Rp 46.616.500	Rp 49.140.000	Rp 78.399.875							
5.14	Operasional Puskesmas Meleta	Rp 521.000.000	Rp 407.500.000	Rp 543.866.698	Rp 359.680.000	Rp 155.016.800	Rp 375.505.000	Rp 333.707.000	Rp 60.470.000	Rp 64.000.000	Rp 97.761.800							
5.15	Operasional Labkesda	Rp 78.900.000	Rp 78.900.000	Rp 147.840.000	Rp 125.140.000	Rp 190.000.000	Rp 78.882.550	Rp 75.230.850	Rp 146.702.926	Rp 115.274.005	Rp 180.517.723							
5.16	Operasional Puskesmas Kawa	Rp 505.000.000	Rp 367.500.000	Rp 186.120.575	Rp 136.800.000	Rp 81.791.000	Rp 350.383.500	Rp 300.440.000	Rp 35.058.000	Rp 38.906.000	Rp 50.937.200							
5.17	Operasional Puskesmas Arga Mulya	Rp 451.187.950	Rp 327.500.000	Rp 154.602.654	Rp 129.800.000	Rp 74.190.300	Rp 408.028.000	Rp 303.000.000	Rp 25.275.000	Rp 24.950.000	Rp 39.721.600							
5.18	Rapat Kerja Teknis(Rakermi) Bidang Kesehatan	Rp -	Rp 97.620.000	Rp 101.620.000	Rp 62.710.000	Rp 62.710.000		Rp 74.280.000	Rp 101.510.750	Rp 61.046.000	Rp 51.221.000							
5.19	Operasional Puskesmas Bukit Jaya	Rp 481.741.000	Rp 387.500.000	Rp 249.930.548	Rp 212.776.000	Rp 112.637.850	Rp 398.670.000	Rp 344.840.000	Rp 51.290.000	Rp 51.900.000	Rp 74.166.300							
5.20	Pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal	Rp -	Rp -	-		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -							
5.21	Magang Tenaga Laboratorium	Rp -	Rp -	Rp 121.380.000	Rp 49.890.000	Rp 49.890.000	Rp -	Rp -	Rp 118.082.675	Rp 48.256.950	Rp 42.882.500							
5.22	Magang Kesturutan Kebidanan	Rp -	Rp -	Rp 106.720.000	Rp 58.285.000	Rp 58.285.000	Rp -	Rp -	Rp 103.964.900	Rp 56.194.900	Rp 53.079.800							
5.23	Pengelolaan Data Tenaga Kesehatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.850.000	Rp 15.850.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15.579.800							
5.24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -							
5.25	Studi Banding BLUD dan Akreditasi Puskesmas	Rp -	Rp -	Rp 122.520.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 185.000.000	Rp -							
5.26	Operasi Katarak Gratis	Rp -	Rp -	-														

6	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp	77.650.000	Rp	92.650.000	Rp	185.980.000	Rp	132.925.000	Rp	54.254.000	Rp	62.717.830	Rp	82.997.456	Rp	184.243.355	Rp	93.540.000	Rp	45.594.200	84,04	70,37	99,07	89,58	80,77		
6.1	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Rp	37.650.000	Rp	21.800.000	Rp	21.800.000	Rp	38.180.000	Rp	16.800.000	Rp	23.638.250	Rp	21.063.125	Rp	20.876.004	Rp	36.665.625	Rp	16.204.700							
6.2	Pertemuan Pengelola Obat	Rp	-	Rp	30.850.000	Rp	91.600.000	Rp	38.845.000	Rp	21.954.000	Rp	-	Rp	28.465.875	Rp	91.467.351	Rp	23.670.375	Rp	14.081.000							
6.3	Pilot Project Pelayanan Kefarmasian	Rp	-	Rp	-	Rp	41.730.000	Rp	55.900.000	Rp	15.500.000	Rp	-	Rp	-	Rp	41.240.000	Rp	33.204.000	Rp	15.308.500							
6.4	Inventarisasi dan Pemetaan Tanaman Obat Tradisional Asli Daerah	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	Rp	30.850.000	Rp	-	Rp	-	Rp	39.079.580	Rp	33.468.456	Rp	30.660.000	Rp	-	Rp	-							
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	-	Rp	111.000.000	Rp	66.000.000	Rp	180.000.000	Rp	145.500.000	Rp	-	Rp	107.136.500	Rp	65.870.000	Rp	173.272.750	Rp	140.596.000	96,63	96,26	99,80	96,52	#DIV/0!		
7.1	Seminar kesehatan dalam rangka HKN	Rp	-	Rp	50.000.000	Rp	-	Rp	57.000.000	Rp	50.500.000	Rp	-	Rp	47.486.500	Rp	-	Rp	55.058.750	Rp	50.096.000							
7.2	Pengembangan Media Informasi	Rp	-	Rp	61.000.000	Rp	66.000.000	Rp	123.000.000	Rp	95.000.000	Rp	-	Rp	59.650.000	Rp	65.870.000	Rp	118.214.000	Rp	90.500.000							
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp	91.000.000	Rp	245.700.000	Rp	276.960.000	Rp	311.500.000	Rp	163.800.000	Rp	90.700.000	Rp	241.099.000	Rp	265.026.925	Rp	296.713.500	Rp	157.520.000	96,17	95,25	95,69	98,13	99,67		
8.1	Pengadaan KMS Bayi/Balita	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	70.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	59.775.000	Rp	20.000.000							
8.2	Pertemuan Evaluasi Program Gizi	Rp	-	Rp	46.300.000	Rp	42.060.000	Rp	-	Rp	28.800.000	Rp	-	Rp	90.628.000	Rp	37.636.500	Rp	69.255.000	Rp	23.870.000							
8.3	Pemantauan dan Pelacakan Status Gizi	Rp	-	Rp	62.100.000	Rp	51.300.000	Rp	181.500.000	Rp	40.000.000	Rp	-	Rp	45.970.000	Rp	50.800.000	Rp	167.683.500	Rp	39.972.000							
8.4	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Rp	91.000.000	Rp	91.000.000	Rp	91.000.000	Rp	60.000.000	Rp	60.000.000	Rp	90.700.000	Rp	58.949.000	Rp	90.890.000	Rp	-	Rp	59.981.000							
8.5	Pendataan Bayi Balita BGM/Bumil KEK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	15.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	13.697.000							
8.6	Sosialisasi Pemberian Tablet FE Pada Remaja Putri	Rp	-	Rp	-	Rp	46.300.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	44.433.175	Rp	-	Rp	-							
8.7	Pertemuan Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif	Rp	-	Rp	46.300.000	Rp	46.300.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	45.552.000	Rp	41.267.250	Rp	-	Rp	-							
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	576.601.950	Rp	790.580.250	Rp	1.813.268.416	Rp	1.502.333.000	Rp	1.773.943.000	Rp	550.041.950	Rp	697.443.350	Rp	1.623.907.250	Rp	1.447.385.000	Rp	1.404.923.245	79,20	96,34	89,56	88,22	95,39		
9.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Rp	53.000.000	Rp	39.500.000	Rp	97.020.000	Rp	174.720.000	Rp	256.720.000	Rp	52.877.000	Rp	16.784.000	Rp	67.483.000	Rp	167.366.000	Rp	163.750.000							
9.2	Peningkatan imunisasi	Rp	96.190.000	Rp	193.690.000	Rp	267.440.000	Rp	244.600.000	Rp	251.378.000	Rp	80.826.000	Rp	160.595.350	Rp	247.345.450	Rp	225.555.700	Rp	210.515.000							
9.3	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Rp	50.450.000	Rp	50.450.000	Rp	50.700.000	Rp	42.850.000	Rp	134.000.000	Rp	46.332.750	Rp	47.602.375	Rp	48.497.600	Rp	42.275.500	Rp	99.320.000							
9.4	Pemberantasan Penyakit Filariasis	Rp	239.858.000	Rp	248.392.000	Rp	351.650.000	Rp	-	Rp	-	Rp	239.465.000	Rp	247.678.500	Rp	350.675.000	Rp	-	Rp	-							
9.5	Penanggulangan HIV AIDS	Rp	-	Rp	-	Rp	54.613.000	Rp	41.700.000	Rp	72.800.000	Rp	-	Rp	-	Rp	47.216.200	Rp	32.788.700	Rp	53.352.500							
9.6	Penanggulangan P2 Kusta	Rp	15.800.000	Rp	15.800.000	Rp	48.850.000	Rp	209.650.000	Rp	131.280.000	Rp	15.774.500	Rp	13.930.000	Rp	48.762.000	Rp	209.140.000	Rp	106.867.000							
9.7	Pemberantasan Penyakit Tidak Menular	Rp	44.984.000	Rp	30.000.000	Rp	112.270.000	Rp	34.370.000	Rp	36.510.000	Rp	39.410.000	Rp	29.674.875	Rp	107.022.500	Rp	34.075.000	Rp	19.730.000							
9.8	Penanggulangan Malaria	Rp	6.100.000	Rp	116.000.000	Rp	673.566.416	Rp	303.540.000	Rp	448.555.000	Rp	5.935.000	Rp	99.895.000	Rp	557.023.500	Rp	299.379.000	Rp	422.619.000							
9.9	Penanggulangan Kasus TBC	Rp	44.868.250	Rp	96.748.250	Rp	157.159.000	Rp	450.903.000	Rp	442.700.000	Rp	44.070.000	Rp	81.283.250	Rp	149.882.000	Rp	436.805.100	Rp	328.769.745							
9.10	Pencegahan dan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Rp	25.351.700	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	25.351.700	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-							
10	Program pengaduan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan Iriananmva	Rp	7.404.661.091	Rp	7.180.148.834	Rp	6.249.780.237	Rp	13.321.977.905	Rp	9.339.501.673	Rp	7.321.323.991	Rp	4.437.024.055	Rp	6.173.926.024	Rp	12.602.310.499	Rp	9.075.576.864	97,17	94,60	98,79	61,80	98,87		
10.1	Pembangunan/rehab pustu polindes	Rp	7.404.661.091	Rp	7.180.148.834	Rp	6.249.780.237	Rp	13.321.977.905	Rp	9.339.501.673	Rp	7.321.323.991	Rp	4.437.024.055	Rp	6.173.926.024	Rp	12.602.310.499	Rp	9.075.576.864							
11	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja	Rp	-	Rp	157.760.000	Rp	244.360.000	Rp	210.410.000	Rp	165.910.000	Rp	-	Rp	147.849.200	Rp	218.426.500	Rp	164.466.250	Rp	143.998.000	86,79	78,16	89,39	93,72	#DIV/0!		
11.1	Lomba Balita Sehat	Rp	-	Rp	65.700.000	Rp	96.400.000	Rp	82.310.000	Rp	82.310.000	Rp	-	Rp	55.967.000	Rp	87.701.500	Rp	78.240.000	Rp	77.230.000							
11.2	Pelatihan Dokter Kecil	Rp	-	Rp	50.000.000	Rp	57.520.000	Rp	50.800.000	Rp	30.800.000	Rp	-	Rp	49.992.200	Rp	50.587.500	Rp	30.399.500	Rp	22.360.000							
11.3	Evaluasi Program KIA	Rp	-	Rp	42.060.000	Rp	42.060.000	Rp	28.000.000	Rp	23.500.000	Rp	-	Rp	41.890.000	Rp	40.968.000	Rp	24.100.250	Rp	20.784.000							
11.4	Pelatihan Kader Kesehatan	Rp	-	Rp	-	Rp	48.380.000	Rp	49.300.000	Rp	29.300.000	Rp	-	Rp	-	Rp	39.169.500	Rp	31.726.500	Rp	23.624.000							
12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp	42.400.000	Rp	84.800.000	Rp	255.440.000	Rp	290.150.000	Rp	328.200.522	Rp	42.345.000	Rp	66.533.000	Rp	190.414.500	Rp	249.812.500	Rp	270.536.000	82,43	86,10	74,54	78,46	99,87		
12.1	Pembinaan Desa Siaga	Rp	-	Rp	-	Rp	109.080.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	71.423.500	Rp	-	Rp	-							
12.2	Pertemuan dan pelacakan kasus AMP	Rp	42.400.000	Rp	42.400.000	Rp	42.400.000	Rp	186.700.000	Rp	143.300.000	Rp	42.345.000	Rp	24.133.000	Rp	40.769.500	Rp	152.728.000	Rp	104.672.000							
12.3	Sosialisasi Kemitraan Bidan dan Dukun	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	48.450.000	Rp	121.450.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	42.702.500	Rp	110.981.000							
12.4	Penjangan Bumil Resti	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	55.000.000	Rp	63.450.522	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	54.382.000	Rp	54.883.000							
12.5	Evaluasi Kemitraan Bidan dan Dukun	Rp	-	Rp	-	Rp	42.060.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	37.874.500	Rp	-	Rp	-							
12.6	Pertemuan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	Rp	-	Rp	42.400.000	Rp	42.400.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	40.347.000	Rp	-	Rp	-							
12.7	Pertemuan Lintas Sektor Dalam Rangka Akselerasi Program Penurunan AKI d	Rp	-	Rp	-	Rp	19.500.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-							
13	Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Rp	300.841.000	Rp	207.850.000	Rp	211.800.000	Rp	60.000.000	Rp	52.905.752	Rp	295.326.318	Rp	201.372.037	Rp	195.820.264	Rp	59.572.250	Rp	40.875.000	77,26	99,29	92,46	96,88	98,17		
13.1	Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Rp	119.591.000	Rp	160.600.000	Rp	142.550.000	Rp	60.000.000	Rp	52.905.752	Rp	114.584.683	Rp	154.133.037	Rp	141.459.764	Rp	59.572.250	Rp	40.875.000							
13.2	Pemantauan Pelaksanaan Program Gizi, KIA, Pelayanan Medik dan Promkes F	Rp	21.250.000	Rp	26.000.000	Rp	26.000.000						Rp	21.127.000	Rp	26.000.000	Rp	25.997.500										
13.3	Supervisi Pelayanan Kesehatan Swasta	Rp	-	Rp	-	Rp	26.000.000										Rp	11.270.000										
13.4	Pendampingan dan Pembinaan Lomba Posyandu, Lomba P2WKS dan Lomba	Rp	160.000.000	Rp	21.250.000	Rp	17.250.000						Rp	159.614.635	Rp	21.239.000	Rp	17.093.000										
14	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp	7.536.181.050	Rp	6.466.268.922	Rp	3.432.326.000	Rp	-	Rp	-	Rp	3.417.008.130	Rp	2.161.825.615	Rp	1.685.336.762	Rp	-	Rp	-	0,00	0,00	49,10	33,43	45,34		
14.1	Kemitraan Palang Merah Indonesia (PMI)	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	77.443.480	Rp	89.376.000	Rp	89.594.300	Rp	-	Rp	-							
14.2	Kemitraan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	213.280.000	Rp	-	Rp	-	Rp	96.366.740	Rp	73.745.600	Rp	195.138.218	Rp	-	Rp	-							
14.3	Kemitraan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	Rp	65.000.000	Rp	115.000.000	Rp	150.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	61.012.000	Rp	-	Rp	148.095.894	Rp	-	Rp	-							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, dapat diidentifikasi factor-faktor kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Treats). sebagai berikut:

2.4.1 Kekuatan (Strength) yaitu

- a. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang telah dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- b. Tersedia peralatan penunjang kegiatan seperti alat audio visual dan komputer.
- c. Adanya Puskesmas yang berpotensi untuk dikembangkan peran dan fungsinya dalam meningkatkan mutu pelayanan.
- d. Adanya dukungan strategis dan politis ditingkat legislatif maupun eksekutif.

2.4.2 Kelemahan (Weakness) yaitu

- a. Belum memadainya tenaga kesehatan
- b. Belum terlaksananya berbagai pelatihan secara kontinu.
- c. Masih tingginya morbiditas beberapa penyakit menular dan kecenderungan peningkatan morbiditas beberapa penyakit tidak menular.
- d. Pelatihan yang dilaksanakan belum terakreditasi sehingga sangat sulit diukur tingkat efektivitasnya.
- e. Masih rendahnya etos kerja petugas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan paradigma baru kesehatan.
- f. Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi syarat baik dari segi mutu maupun jumlah.
- g. Kondisi geografis yang tidak mendukung, masih ada wilayah yang sangat terpencil sehingga perlu kebijakan khusus penempatan tenaga kesehatan.
- h. Belum berkembangnya perencanaan, koordinasi terpadu, dan sistem informasi kesehatan.

2.4.3 Peluang (Opportunity) yaitu

- a. Kebijakan desentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi daerah.
- b. Sektor kesehatan merupakan prioritas kedua setelah sektor pendidikan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) di Kabupaten Lamandau.
- c. Adanya bantuan dana, sarana dan prasarana dari pihak lain (provinsi dan Kementerian Kesehatan).
- d. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.
- e. Adanya kebijakan nasional yang mendukung program-program kesehatan seperti pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, gizi, KIA dan sebagainya.

2.4.4 Tantangan / Ancaman (Threat) yaitu

- a. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan.
- b. Tingkat Partisipasi masyarakat yang belum optimal.
- c. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi memungkinkan adanya penularan penyakit dari luar daerah.
- d. Persepsi tentang paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan oleh sektor lain masih belum optimal.
- e. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan sosial ekonomi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Masalah – masalah yang ditemukan di bidang kesehatan akan diuraikan sebagai berikut

a. **Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB)**

Angka Kematian Ibu tahun 2018 di Kabupaten Lamandau cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Target SDGs 70 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Penyebab AKI ada beberapa faktor, yakni :

- 1) Perdarahan pada ibu bersalin yang dapat terjadi sebelum, selama dan sesudah persalinan yang disebabkan karena robekan jalan lahir, retensi placenta, inersia uteri, ruptur uteri, dsb. Perdarahan postpartum juga dapat disebabkan oleh atonia uteri dengan anemia sebagai salah satu penyebab. Permasalahan terkait dengan upaya penatalaksanaan kegawatdaruratan obstetrik yang belum optimal.
- 2) Eklampsia dan kehamilan ektopik terganggu sebenarnya dapat terdeteksi awal melalui *Antenatal Care* (ANC) rutin. Masalahnya terletak pada kemampuan petugas dalam hal tatalaksana yang masih kurang, disamping itu perilaku ANC ibu hamil juga rendah.
- 3) Penyebab tidak langsung memiliki prevalensi lebih tinggi. Hal ini tampaknya kurang diperhatikan oleh petugas/bidan pada saat ANC.
- 4) Faktor sosiogeografis juga memegang peranan penting dalam terjadinya kematian ibu hamil/bersalin. Beberapa hal yang melatarbelakangi kejadian kematian ibu di luar faktor medis, yakni keterlambatan rujukan yang disebabkan 1) keterlambatan dalam mengambil keputusan pada saat merujuk pada bumil resti dan 2) Keterlambatan penderita untuk mencapai sarana pelayanan

kesehatan. Kedua keterlambatan tersebut terkait dengan kondisi wilayah di sebagian kecamatan di kabupaten Lamandau, dimana sarana transportasi umum masih menjadi kendala sementara jarak ke RS rujukan cukup jauh. Perlu keterlibatan lintas sektor dalam mendukung Gerakan Sayang Ibu.

Angka kematian bayi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018 yaitu 24 per 1000 KH (target 24 per 1000 KH) / Target SDGs 12 per 1000 Kelahiran Hidup. Dalam beberapa tahun terakhir angka penurunan menunjukkan stagnasi sedangkan target SDGs pada tahun 2030 masih jauh dari kondisi yang ada pada saat ini. Beberapa upaya intervensi untuk mendukung akselerasi penurunan AKI dan AKB adalah

- 1) KIE kepada ibu hamil
- 2) Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan
- 3) Kecepatan pengambilan keputusan rujukan
- 4) Penambahan tenaga bidan
- 5) Perbaikan sistem informasi kesehatan
- 6) Pendampingan persalinan

b. Endemisitas Penyakit Menular

a) Penyakit DBD

Angka kesakitan (*Incidence Rate/IR*) DBD pada lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Penyakit DBD perlu mendapat perhatian serius karena resiko endemis DBD yang semakin tinggi dan berkaitan dengan rumah bebas jentik. DBD terkait erat dengan kurang efektifnya metode penyuluhan DBD terhadap perubahan yang diharapkan dari perilaku masyarakat khususnya terhadap upaya PSN. Target Penderita DBD yang Ditangani 100%.

b) Penyakit Tuberkulosis

Penyakit TBC belum dapat dikelola dengan baik, ditandai dengan penemuan penderita yang masih belum sesuai harapan dan tingkat kesembuhan juga belum maksimal. Cakupan penemuan kasus BTA positif selalu di bawah standar nasional. Hal ini terjadi karena

kurang optimalnya program *case finding* TB paru yang selama ini dikerjakan. Beberapa penyebabnya antara lain sebagian masyarakat Lamandau (penderita TBC) berobat diluar unit pelayanan kesehatan Lamandau, banyak penderita(suspek) berobat ke praktisi swasta, namun praktisi swasta belum tercakup program DOTS. Lemahnya sistem informasi kesehatan juga menjadi salah satu faktor rendahnya penemuan kasus TBC. Faktor-faktor penyebab tingginya kesakitan TB disebabkan oleh:

- a. Pemahaman penderita tentang bahaya TB dan upaya yang harus diikutinya masih rendah.
- b. Penderita bosan terhadap lamanya proses pengobatan
- c. Efek samping obat pada sebagian penderita yang dirasakan sangat mengganggu.

c) Penyakit HIV/AIDS

Penyakit menular seksual dan penderita penyakit HIV AIDS terdapat kecenderungan meningkat. Kondisi ini mengancam upaya pencapaian tujuan SDGs's. Target MDG's 2030 mengakhiri epidemi HIV / AIDS.

d) Penyakit Malaria

Penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, perkembangan penyakit malaria dipantau melalui annual parasite incidence (API). Dari laporan hasil kegiatan sementara tahun 2018, cenderung meningkat. Target Nasional Menekan jumlah kasus menjadi kurang dari 1 per 1000 kasus malaria positif yang ditemukan melalui pelayanan dan target nasional Indonesia bebas malaria pada tahun 2030 (Kementerian Kesehatan).

c. Masih Adanya Bayi Gizi Kurang dan ancaman Gizi Buruk

Penderita gizi buruk masih dijumpai di Kabupaten Lamandau dan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan masih adanya potensi peningkatan penderita karena masih belum baiknya perilaku, pelayanan dan kondisi lingkungan sosial ekonomi. Kondisi ini mengancam upaya pencapaian tujuan MDG's dan target Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan sebesar 100%.

d. Kondisi kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar

Kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat. Kondisi ini antara lain meliputi rumah sehat, tempat-tempat umum (termasuk lingkungan kerja), kondisi air bersih dan kepemilikan sanitasi dasar seperti jamban / WC dan air limbah.

e. Pentingnya Kegawatdaruratan dan Manajemen Bencana

Kenyataan menunjukkan, Kabupaten Lamandau memiliki banyak peristiwa bencana misalnya dalam bentuk banjir di beberapa wilayah, dan angin ribut. Bencana bersumber manusia jumlahnya juga tidak sedikit, misalnya konflik kelompok, kecelakaan juga masih banyak ditemukan. Berbagai bencana tersebut memberikan konsekuensi bagi kesehatan ketika tidak dilakukan persiapan kesiapsiagaan dengan baik.

f. Jaminan Pembiayaan Kesehatan Yang Menyeluruh

Besarnya biaya pemerintah untuk pembangunan termasuk pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Amanat UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan agar pembiayaan untuk didorong minimal 10 % APBD diluar gaji. Upaya mobilisasi dana dan sumberdaya di masyarakat juga belum maksimal dan masih bersifat *out of pocket*. Ketika biaya kesehatan terus meningkat, mekanisme pembiayaan di Kabupaten Lamandau belum juga berkembang dan sementara masih sedikit masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan meskipun kemampuan masyarakat untuk membayar pelayanan cukup baik.

g. Penyakit Degeneratif Yang Semakin Tinggi

Penyakit degeneratif mulai menjadi permasalahan kesehatan yang serius disamping penyakit-penyakit infeksi. Hal ini dapat dilihat dari penyebab utama kematian di rumah sakit umum Kabupaten Lamandau adalah Hipertensi dan *kencing manis* / DM. Hal ini terkait dengan perubahan gaya hidup, pola makan dan tingkat stres/ himpitan hidup yang semakin tinggi. Terjadinya perubahan pola demografi dengan meningkatnya jumlah usia lanjut yang memberi konsekuensi

peningkatan jumlah kasus penyakit degeneratif. Selain itu lemahnya sistem informasi kesehatan juga merupakan suatu kendala untuk menanggulangi permasalahan ini, selain itu permasalahan ini akan semakin meningkat mengingat masih belum baiknya perilaku hidup sehat masyarakat.

h. Belum Adanya SIK Yang Handal

Sistem informasi kesehatan memang bukan permasalahan kesehatan tetapi ternyata dari hubungan konseptual permasalahan kesehatan dan determinan kesehatan sistem informasi kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan kesehatan tersebut. Selama ini Dinas Kesehatan Lamandau belum mempunyai sistem informasi yang handal. Hampir di semua masalah kesehatan di Kabupaten Lamandau, dengan faktor penyebab tak langsung adalah lemahnya sistem informasi kesehatan.

Faktor-faktor yang menyebabkan masih lemahnya SIK antara lain:

- o Masih kurangnya komitmen dari pengambil keputusan tentang pentingnya SIK
- o Masih lemahnya SDM yang menangani SIK
- o Software SIKDA yang difasilitasi Dinas Kesehatan Propinsi Kalteng dan Kementerian Kesehatan belum juga dioperasionalisasi.

i. Belum Memadainya Regulasi Kesehatan

Tingginya angka kematian Ibu dan Bayi, rendahnya penemuan kasus TB, kegawatdaruratan, dan dapat dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab tak langsungnya adalah regulasi kesehatan yang belum memadai, sehingga tak mampu melindungi konsumen dari praktek kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta.

Adapun hubungan antara masalah-masalah yang ditemukan tersebut diatas dan hubungannya dengan determinan kesehatan dapat kami uraikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.1
Hubungan Antara Masalah Kesehatan dan Determinan Kesehatan

MASALAH KESEHATAN	DETERMINAN KESEHATAN			
	Pelayanan kesehatan	Lingkungan	Perilaku	Kependudukan
Angka Kematian Bayi	- Kemampuan tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan Persalinan resiko tinggi dan kegawatdaruratan kurang - KIE petugas belum optimal - Sarana dan prasana kesehatan belum memadai	- Sosial ekonomi rendah - Lemahnya regulasi	- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya ANC rendah - Kesadaran makan makanan bergizi kurang - Masih adanya persalinan oleh dukun	- Tingkat pendidikan masyarakat rendah - Sebaran penduduk tidak merata
Angka Kematian Ibu	- Kemampuan nakes dalam penatalaksanaan persalinan resti dan kegawatdaruratan kurang - Sarana pendukung dalam kegawatdaruratan Obstetri kurang - Penatalaksanaan Protap Kurang - SIK Bumil belum optimal - Kualitas Antenatal Care kurang optimal - Kemampuan deteksi dini resti bumil oleh tenaga kesehatan masih rendah - KIE petugas belum optimal - Profesionalisme tenaga kesehatan masih kurang	- Sosial ekonomi rendah - Pemberdayaan perempuan rendah - Tidak tersedia transportasi setiap saat pada kecamatan sulit - Sarana komunikasi belum menjangkau semua wilayah	- Masih ada kepercayaan pada dukun - Motivasi periksa kesehatan rendah - Pengetahuan masyarakat rendah - Rendahnya peran serta masyarakat	- Tingkat pendidikan masyarakat rendah - Mobilitas penduduk tinggi - Masih ada angka buta huruf
Meningkatnya kasus penyakit menular dan tidak menular, yaitu : - Angka Kesakitan DBD masih Tinggi - Penemuan Kasus TB Paru - Antisipasi kasus HIV/AIDS - Meningkatnya penyakit degeneratif	- Motivasi pelayanan kesehatan masyarakat rendah - Sarana dan prasarana kurang - Penanganan di fasilitas rujukan kurang adekuat - Surveillance Epidemiologi kurang optimal - Manajemen program kesehatan kurang efektif - Teknologi penatalaksanaan kurang efektif - Kemampuan tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan TB rendah - Banyak masyarakat berobat diluar Kabupaten Lamandau - UPK Swasta belum optimal dalam program DOTS - KIE rendah - SIK lemah - Kualitas Pelayanan Kesehatan yang kurang optimal	- Kebersihan lingkungan sekolah rendah - Sosial ekonomi rendah - Lingkungan pemukiman yak yang mendukung kembang biak nyamuk aedes agepty - Rumah sehat kurang - Pengelolaan sampah kurang - Tingkat Penghasilan rendah - Lemahnya - Regulasi - Tingkat polutan yang diatas ambang batas	- Pemanfaatan lahan rendah - Perilaku buang sampah kurang baik - Perilaku masyarakat cenderung menumbuhkan sarang nyamuk - Pola makan yang kurang sehat - Gaya hidup yang tidak sehat	- Tingkat pendidikan rendah - Masih ada angka buta huruf - Tingkat pendidikan masyarakat rendah
Antisipasi Gizi Buruk dan penanganan Gizi Kurang	Pelayanan gizi kurang optimal	- Keanekaragaman pangan tingkat rumah tangga / keluarga rendah - Sosial ekonomi rendah	- Keluarga sadar gizi (Kadarzi) masih rendah	- Tingkat pengetahuan ibu/keluarga rendah - Kemiskinan
Kesehatan lingkungan / sanitasi dasar	- Tenaga kesehatan terlatih kurang	- Sosial ekonomi rendah - Lemahnya regulasi	- Kesadaran masyarakat termasuk perilaku berdampak kesehatan lingkungan masih kurang	- Tingkat pendidikan / pengetahuan masyarakat rendah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penyebab-penyebab masalah yang selalu maupun paling sering muncul menjadi penyebab masalah di setiap determinan setelah dikelompokkan antara lain adalah :

1. Dari sisi pelayanan kesehatan, permasalahan yang paling sering muncul adalah:
 - a. Kurangnya KIE petugas kesehatan (kualitas maupun kuantitas);
 - b. Kurangnya kemampuan petugas;
 - c. Kurangnya sarana prasarana kesehatan;
 - d. Sistem Informasi Kesehatan yang kurang baik;
 - e. Lemahnya manajemen program kesehatan dan monitoring evaluasi;
 - f. Dana pelayanan kesehatan masyarakat yang masih rendah (<10%).
2. Dari sisi Lingkungan adalah rendahnya :
Sosial ekonomi masyarakat, disamping adat-istiadat kurang baik yang berlaku dimasyarakat, serta lingkungan kesehatan yang meliputi sanitasai dasar, kualitas air bersih, dan kondisi lingkungan pemukiman.
3. Berdasarkan faktor Perilaku :
 - a. Motivasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup rendah;
 - b. Peran serta masyarakat;
 - c. Kesadaran dan pola makan yang kurang mendukung terciptanya derajat kesehatan yang optimal;
 - d. Faktor rendahnya pengetahuan kesehatan masyarakat dan tingginya mobilitas penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan dari sisi demografi.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah *“Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius Dan Aman)”* dengan misi sebagai berikut

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).;
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera;
- 3) Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup;
- 4) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius, dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal;
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Berdasarkan telaahan terhadap 5 (lima) Misi Bupati Lamandau Tahun 2018 – 2023 tersebut terlihat jelas peran serta Dinas Kesehatan sebagaimana terdapat dalam pernyataan Misi Nomor 2 yaitu *“Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera”*.

Kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan sejahtera dilakukan melalui aspek-aspek penting pembangunan manusia meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta peningkatan masyarakat yang hidup layak.

Sebagai upaya dalam mencapai misi ke 2 yaitu meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera, maka ditetapkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter dengan sasaran dibidang kesehatan adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator Angka Usia Harapan Hidup yang mencapai 70,20 tahun pada tahun 2023.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2)

meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

- 1) Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012);
- 2) Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
- 3) Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
- 4) Meningkatkan upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
- 5) Meningkatkan upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Kesehatan tersebut maka strategi pembangunan kesehatan 2005 - 2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 dengan tujuan indikator Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang bersifat dampak (impact atau outcome) dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi diharapkan pada tahun 2021 adalah 1.000.
2. Angka Usia Harapan Hidup dari 69,54 tahun menjadi 72,75 tahun.
3. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 183 menjadi 160

4. Angka Kematian Bayi dari 25 menjadi 23
5. Angka Kematian Balita per 1000 Balita dari 56 menjadi 32.
6. Persentase Balita Gizi Buruk dari 19,6 % menjadi 17 %
7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dari 42,06 menjadi 84,5
8. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk dari 1,42 menjadi 1,9
9. Persentase distribusi tempat tidur rumah sakit menurut kab/kota dari 86,3% menjadi 88%.

Berdasarkan telaahan terlihat bahwa upaya kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kalimantan Tengah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Tengah dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal dan kelompok lansia.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pola ruang. RTRW ini dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana kesehatan sehingga ketimpangan dalam pelayanan kesehatan dapat berkurang. Pola pengembangan perizinan penggunaan lahan dalam RTRW akan membantu Dinas Kesehatan untuk lebih awal mengidentifikasi faktor-faktor resiko terjadinya masalah kesehatan misalnya berkaitan dengan lahan gambut / lahan rawa yang dapat menyebabkan masalah kesehatan berbasis nyamuk dan masalah kesehatan lingkungan.

Salah satu Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 adalah manajemen bencana dengan permasalahan terkait tingginya tingkat pencemaran air sungai potensi menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pertanian, misalnya sebagai akibat sepertiga lahan pertanian terkena banjir berpotensi menimbulkan dampak menurunnya kesehatan masyarakat, serta berpotensi menurunkan sumberdaya air bersih.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Lamandau pada Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan di bidang kesehatan diuraikan sebagai berikut

Tabel 3.2

Tema, Tujuan dan Isu / Permasalahan Terkait dalam KLHS RPJMD 2018 – 2023
Kabupaten Lamandau

No	Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan SDGs	Isu / Permasalahan Terkait
1	Kesehatan	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia	1. Sarana dan prasarana dasar kesehatan perlu ditingkatkan; 2. Obat dan perbekalan kesehatan perlu ditambah baik kuantitas dan kualitasnya; 3. Operasional puskesmas di setiap kecamatan belum optimal; 4. Rendahnya rasio dokter per satuan penduduk; 5. Rendahnya rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk; 6. Rendahnya rasio rumah sakit per satuan penduduk;

Sumber : KLHS RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Lamandau

Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan akan dikaitkan dengan kriteria pembangunan berkelanjutan dalam konteks lingkungan hidup. Adapun kriteria tersebut terdiri dari 11 (sebelas) poin kriteria menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 pasal 9. Sebelas kriteria tersebut terdiri dari 3 aspek pembangunan berkelanjutan, khusus dibidang kesehatan kriterianya adalah Resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat (kesehatan masyarakat).

Permasalahan dan isu strategis indikator TPB untuk Tujuan Tanpa Kemiskinan dengan indikator bidang kesehatan adalah proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan dan persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Berdasarkan telaahan KLHS yang memuat konsep SDG's adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia (kehidupan sehat dan sejahtera). Tujuan ini menjelaskan

bagaimana menjamin kehidupan sehat dan menudukung kesejahteraan bagi semua di segala usia. Tujuan ini berbicara tentang membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur. Tujuan 3 ini sangat penting bagi pemerintah daerah dimana penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak, dan bayi. Pemerintah daerah di kawasan perkotaan khususnya harus waspada terhadap tingkat kematian anak yang tidak kian menurun. Pemerintah daerah dapat menangani permasalahan ini melalui program perbaikan permukiman kumuh dan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan dasar. HIV/AIDS semakin dipahami sebagai sebuah permasalahan pemerintahan daerah. Kawasan perkotaan seringkali bertindak sebagai penghubung penyebaran HIV/AIDS karena kepadatan penduduknya yang tinggi, pusat sarana transportasi dan besarnya keberadaan kelompok rentan. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, membiasakan kegiatan terkait HIV/AIDS di seluruh instansi, serta mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan. Telah banyak pula pemerintah daerah yang menyediakan pendidikan, informasi, dan layanan untuk mencegah HIV/AIDS. Pemerintah daerah dapat menggunakan perencanaan daerah dan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara, memelihara gaya hidup sehat dan mencegah kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Pemerintah daerah dapat berkontribusi kepada pengurangan angka kematian akibat polusi air dan tanah melalui manajemen sumber daya alam yang efektif dan perlindungan terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Guna meningkatkan fungsi dan kinerja Dinas Kesehatan, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan untuk menyusun kebijakan perencanaan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan analisa permasalahan kesehatan dan situasi kesehatan di Kabupaten Lamandau, Telaah Visi Misi Kepala Daerah, Telaah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Telaah Rencana strategis Kementerian Kesehatan RI, Telaah Kajian Tata Ruang Wilayah dan

Lingkungan Strategis, serta analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan, maka ditentukan Isu-isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasi dan kondisi lima tahun ke depan yang diharapkan Dinas Kesehatan dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Angka Kematian Ibu;
2. Angka Kematian Bayi;
3. Jaminan kesehatan bagi semua penduduk;
4. Kegawatdaruratan dan manajemen bencana;
5. Tenaga kesehatan yang merata di semua desa;
6. Antisipasi Gizi Buruk dan penanganan Bawah Garis Merah (BGM);
7. Penanggulangan penyakit menular, khususnya Demam Berdarah Dengue, TB Paru dan HIV / AIDS;
8. Peningkatan Kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
9. Meningkatnya penyakit degeneratif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lamandau tahun 2018 – 2023. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau yang memuat visi, misi tujuan dan sasaran sebagai berikut

4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau 2018 -2023

A. Visi

Visi RPJMD Kabupaten Lamandau 2018 – 2023 adalah “Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius Dan Aman)”.

B. Misi

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius, dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan 5 (lima) misi pada RPJMD tersebut diatas, misi yang terkait dengan bidang kesehatan adalah misi kedua yaitu

“meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera”.

C. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau 2018 - 2023

Tujuan yang terkait dengan misi kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter dengan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut

- 1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan prestasi Olahraga dengan indikator Indeks Pendidikan dan Persentase Cabang Olah Raga yang Berprestasi;
- 2) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator Angka Usia Harapan Hidup;
- 3) Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).

Berdasarkan uraian tujuan tersebut diatas, maka sasaran RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Lamandau dibidang kesehatan adalah Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator Angka Usia Harapan Hidup.

4.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023

A. Tujuan Dinas Kesehatan

Sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamandau, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kesehatan sampai tahun 2023 *“terciptanya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, terjangkau dan bermutu”* dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup.

B. Sasaran Dinas Kesehatan

Adapun Sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah

- 1) Meningkatnya kesehatan masyarakat dengan indikator Cakupan Kesehatan Masyarakat;

- 2) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator Cakupan Pelayanan Penyakit;
- 3) Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan indikator Cakupan Akses dan Mutu Kesehatan.

Uraian tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINNERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, terjangkau dan bermutu	Angka Usia Harapan Hidup			69,40 tahun	69,60 tahun	69,80 tahun	70 tahun	70,20 tahun
a			Meningkatnya kesehatan masyarakat	Cakupan Kesehatan Masyarakat	60%	65%	70%	80%	90%
b			Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Cakupan Pelayanan Penyakit	85%	85%	90%	95%	95%
c			Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Cakupan Akses dan Mutu Kesehatan	80%	80%	80%	80%	80%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan.

5.1 STRATEGI

Strategi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023, strategi yang dilaksanakan adalah

- 1) Penguatan upaya kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya dengan peran serta masyarakat;
- 2) Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular / tidak menular secara cepat dan tepat;
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kegawatdarutan sesuai standar, penyediaan fasilitas pelayanan serta SDM kesehatan yang merata dan berkualitas.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau merupakan arah / tindakan yang dijadikan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan akhir tahun 2023. Kebijakan yang akan ditempuh dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, dirumuskan sebagai berikut

- 1) Peningkatan pelayanan puskesmas terutama kepada masyarakat rentan;
- 2) Penguatan pelayanan imunisasi, pelaksanaan kegiatan pencegahan yang terpadu dan penanganan penyakit sesuai standar;
- 3) Pemenuhan kebutuhan sarana, prasana, tenaga kesehatan dan jaminan kesehatan serta peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dalam Renstra Tahun 2018 – 2023 dituangkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
Tahun 2018 -2023

VISI : Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius Dan Aman)			
MISI II : <i>Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, terjangkau dan bermutu	Meningkatnya kesehatan masyarakat	1 Penguatan upaya kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya dengan peran serta masyarakat	1 Peningkatan pelayanan puskesmas terutama kepada masyarakat rentan
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	1 Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular / tidak menular secara cepat dan tepat	1 Penguatan pelayanan imunisasi, pelaksanaan kegiatan pencegahan yang terpadu dan penanganan penyakit sesuai standar.
	Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan	1 Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kegawatdarutan sesuai standar, penyediaan fasilitas pelayanan serta SDM kesehatan yang merata dan berkualitas.	1 Pemenuhan kebutuhan sarana, prasana, tenaga kesehatan dan jaminan kesehatan serta peningkatan mutu layanan kepada msyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi untuk mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau menetapkan Rencana Program dan Kegiatan untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2018 – 2023 sebagai berikut :

A. Rencana Program

- 1) Program Upaya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ;
- 3) Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengadaan Obat / Perbekalan Kesehatan;
- 5) Program Manajemen Kesehatan, Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya;
- 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

B. Rencana Kegiatan

- 1) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan;
- 2) Pengelolaan Puskesmas Bulik;
- 3) Pengelolaan Puskesmas Sematu;
- 4) Pengelolaan Puskesmas Delang;
- 5) Pengelolaan Puskesmas Tapin Bini;
- 6) Pengelolaan Puskesmas Kinipan;
- 7) Pengelolaan Puskesmas Bayat;
- 8) Pengelolaan Puskesmas Merambang;
- 9) Pengelolaan Puskesmas Melata;
- 10) Pengelolaan Labkesda;
- 11) Pengelolaan Puskesmas Kawa;

- 12) Pengelolaan Puskesmas Arga Mulya;
- 13) Pengelolaan Puskesmas Bukit Jaya;
- 14) Dukungan Manajemen Puskesmas;
- 15) Pengembangan dan Peningkatan Promosi Kesehatan;
- 16) Peningkatan Status Gizi Masyarakat;
- 17) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak, Balita, Remaja, PUS, WUS dan Lansia;
- 18) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
- 19) Pengelolaan Pelayanan Imunisasi;
- 20) Penanggulangan Wabah Bencana, KLB dan Surveilans;
- 21) Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Penyakit Menular Melalui Saluran Nafas dan Pencernaan;
- 22) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang;
- 23) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual;
- 24) Pencegahan, Skrining dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- 25) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Haji dan Kawasan Tanpa Rokok;
- 26) Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- 27) Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional;
- 28) Kemitraan Palang Merah Indonesia (PMI);
- 29) Kemitraan Komisi Penanggulangan Aids (KPA);
- 30) Penyelenggaraan BOK Puskesmas;
- 31) Jaminan Persalinan;
- 32) Pengelolaan BLUD Puskesmas Bulik;
- 33) Pengelolaan BLUD Puskesmas Sematu;
- 34) Pengelolaan BLUD Puskesmas Delang;
- 35) Pengelolaan BLUD Puskesmas Tapin Bini;
- 36) Pengelolaan BLUD Puskesmas Bayat;
- 37) Pengelolaan BLUD Puskesmas Merambang;
- 38) Pengelolaan BLUD Puskesmas Melata;
- 39) Pengelolaan BLUD Puskesmas Kawa;
- 40) Pengelolaan BLUD Puskesmas Arga Mulya;
- 41) Pengelolaan BLUD Puskesmas Bukit Jaya;
- 42) Pengelolaan BLUD Puskesmas Kinipan;

- 43) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Layanan Kegawatdaruratan;
- 44) Pengelolaan Manajemen dan Pengawasan Obat, Perbekalan, alat kesehatan dan pangan;
- 45) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Obat Tradisional;
- 46) Pengelolaan dan Pengadaan Obat / Perbekalan Kesehatan;
- 47) Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya;
- 48) Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Informasi Kesehatan;
- 49) Pengelolaan SDM Kesehatan dan Perizinan;
- 50) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 51) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
- 52) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
- 53) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 54) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 55) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 56) Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan;
- 57) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 58) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 59) Penyediaan Makanan Dan Minuman;
- 60) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- 61) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- 62) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 63) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 64) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- 65) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
- 66) Pendidikan Dan Pelatihan Formal.

Uraian lengkap tentang Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program kesehatan kurun waktu 2018 – 2023 sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp	2022	Rp	2023	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terciptanya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, terjangkau dan bermutu				Angka Usia Harapan Hidup	68,98	69,40		69,60		69,80		70,00		70,20		70,20	0		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kesehatan masyarakat			Cakupan Kesehatan Masyarakat	56,37%	60%		65%		70%		80%		90%		90%	0		
		1	Program Upaya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Kesehatan Masyarakat	56,37%	60%		65%	9.248.372.500	70%	9.479.581.813	80%	9.716.571.358	90%	9.959.485.642	90%	9.959.485.642		
		1.1	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Cakupan Desa SBS	19,32%	25%		31%	307.500.000	36%	315.187.500	42%	323.067.188	48%	331.143.867	48%	331.143.867		
				Cakupan Desa Melakukan STBM	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Cakupan TTU yang memenuhi syarat	35%	45%		55%		65%		75%		85%		85%			
				Cakupan TPM yang memenuhi syarat	35%	45%		55%		65%		75%		85%		85%			
				Cakupan pengawasan air minum	10%	20%		40%		60%		80%		95%		95%			
		1.2	Pengelolaan Puskesmas Bulik	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	850.000.000	90%	871.250.000	95%	893.031.250	100%	915.357.031	100%	915.357.031		
		1.3	Pengelolaan Puskesmas Sematu	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	700.000.000	90%	717.500.000	95%	735.437.500	100%	753.823.438	100%	753.823.438		
		1.4	Pengelolaan Puskesmas Delang	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	600.000.000	90%	615.000.000	95%	630.375.000	100%	646.134.375	100%	646.134.375		
		1.5	Pengelolaan Puskesmas Tapin Bini	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	700.000.000	90%	717.500.000	95%	735.437.500	100%	753.823.438	100%	753.823.438		
		1.6	Pengelolaan Puskesmas Kinipan	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	700.000.000	90%	717.500.000	95%	735.437.500	100%	753.823.438	100%	753.823.438		
		1.7	Pengelolaan Puskesmas Bayat	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	750.000.000	90%	768.750.000	95%	787.968.750	100%	807.667.969	100%	807.667.969		
		1.8	Pengelolaan Puskesmas Merambang	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	700.000.000	90%	717.500.000	95%	735.437.500	100%	753.823.438	100%	753.823.438		
		1.9	Pengelolaan Puskesmas Melata	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	700.000.000	90%	717.500.000	95%	735.437.500	100%	753.823.438	100%	753.823.438		
		1.10	Pengelolaan Labkesda	Cakupan pelaksanaan kegiatan labkesda	56,28	85%		100%	80.872.500	100%	82.894.313	95%	84.966.670	100%	87.090.837	100%	87.090.837		
		1.11	Pengelolaan Puskesmas Kawa	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	600.000.000	90%	615.000.000	95%	630.375.000	100%	646.134.375	100%	646.134.375		
		1.12	Pengelolaan Puskesmas Arga Mulya	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	600.000.000	90%	615.000.000	95%	630.375.000	100%	646.134.375	100%	646.134.375		
		1.13	Pengelolaan Puskesmas Bukit Jaya	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	600.000.000	90%	615.000.000	95%	630.375.000	100%	646.134.375	100%	646.134.375		
		1.14	Dukungan Manajemen Puskesmas	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	450.000.000	90%	461.250.000	95%	472.781.250	100%	484.600.781	100%	484.600.781		
		1.15	Pengembangan dan Peningkatan Promosi Kesehatan	Cakupan sarana kesehatan dan sekolah dasar yang ber-PHBS	5%	10%		20%	205.000.000	30%	210.125.000	40%	215.378.125	50%	220.762.578	50%	220.762.578		
				Jumlah Desa Slaga	1 desa	0 desa		4 desa		6 desa		8 desa		10 desa		10 desa			
				Cakupan Sosialisasi dan implementasi GERMAS di kecamatan	0%	0,00		25,00		50,00		87,50		100,00		100,00			
				Indeks Keluarga Sehat	0,155	0,20		0,30		0,40		0,60		0,80		0,80			
		1.16	Peningkatan Status Gizi Masyarakat	Persentase Gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%		100%	205.000.000	100%	210.125.000	100%	215.378.125	100%	220.762.578	1	220.762.578		
				Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilayani	82%	85%		85%		90%		95%		100%		100%	0		
				Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilayani	84%	85%		85%		90%		95%		100%		100%	0		
				Persentase pelayanan kesehatan balita yang dilayani	85,00%	85%		85%		90%		95%		100%		100%	0		
		1.17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak, Balita, Remaja, PUS, WUS dan Lansia	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilayani	80%	85%		85%	250.000.000	90%	256.250.000	95%	262.656.250	100%	269.222.656	100%	269.222.656		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp	2022	Rp	2023	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilayani	77,20%	85%		85%		90%		95%		100%		100%			
				Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin yang dilayani	85%	85%		85%		90%		95%		100%		100%			
				Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani	92,70%	85%		85%		90%		95%		100%		100%			
				Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilayani	1,70%	85%		85%		90%		95%		100%		100%			
				Persentase pelayanan kesehatan balita yang dilayani	85,00%	85%		85%		90%		95%		100%		100%			
				Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif yang dilayani	8%	10%		15%		30%		50%		70%		70%			
		1.18	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilayani	77,20%	85%		85%	250.000.000	90%	256.250.000	95%	262.656.250	100%	269.222.656	100%	269.222.656		
				Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin yang dilayani	85%	85%		85%		90%		95%		100%		100%			
				Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani	92,70%	85%		85%		90%		95%		100%		100%			
				Persentase pelayanan kesehatan balita yang dilayani	85,00%	85%		85%		90%		95%		100%		100%			
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit			Cakupan Pelayanan Penyakit	75%	85%		85%		90%		95%		95%		95%		Bidan g P3	
		2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Cakupan Pelayanan Penyakit	75%	85%		85%	1.750.000.000	90%	1.793.750.000	95%	1.838.593.750	95%	1.884.558.594	95%	1.884.558.594		
		2.1	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Cakupan imunisasi dasar lengkap	85,00%	90%		90%	250.000.000	90%	256.250.000	90%	262.656.250	90%	269.222.656	90%	269.222.656		
				Cakupan desa / kelurahan UCI	92,00%	94%		94%		94%		94%		94%		94%			
		2.2	Penanggulangan Wabah Bencana, KLB dan Surveilans	Cakupan KLB yang ditangani	100%			100%	250.000.000		256.250.000		262.656.250		269.222.656		269.222.656		
				Penemuan Kasus AFP	0	0 orang		2 orang		2 orang		3 orang		3 orang					
		2.3	Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Penyakit Menular Melalui Saluran Nafas dan Pencernaan	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB yang dilayani	100%	100%		100%	250.000.000	100%	256.250.000	100%	262.656.250	100%	269.222.656	100%	269.222.656		
				Cakupan penderita kusta yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2.4	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang	Cakupan penderita DBD yang ditangani	100%	100%		100%	250.000.000	100%	256.250.000	100%	262.656.250	100%	269.222.656	100%	269.222.656		
				Cakupan minum obat filariasis	87,02%	90%		95%		97%		98%		99%		99%			
				Annual Paracite Incidence (Permil)	0	0		0		0		0		0		0			
		2.5	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang dilayani	100%	100%		100%	250.000.000	100%	256.250.000		262.656.250		269.222.656		269.222.656		
		2.6	Pencegahan, Skrining dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang dilayani	8,30%	10%		15%	250.000.000	30%	256.250.000		262.656.250		269.222.656		269.222.656		
				Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif yang dilayani	8%	10%		15%		30%		50%		70%		70%			
				Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilayani	1,70%	10%		15%		30%		50%		70%		70%			
				Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang dilayani	3,40%	10%		15%		30%		50%		70%		10%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp	2022	Rp	2023	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Haji dan Kawasan Tanpa Rokok	Persentase pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang dilayani	69%	90%		100%	250.000.000	100%	256.250.000	100%	262.656.250	100%	269.222.656	100%	269.222.656	Bidan g PSDM K	
				Cakupan skrining kesehatan haji	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase implementasi Sekolah dengan Kawasan Tanpa Rokok	13,45%	15%		20%		25%		35%		50%		50%			
				Cakupan Akses dan Mutu Kesehatan	65%	80%		80%		80%		80%		80%		80%			
		3	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan 1 desa 2 tenaga kesehatan	67,50%	67,50%		80%	7.470.394.200	85%	8.837.154.055	90%	10.019.332.897	95%	10.231.066.218	95%	10.231.066.218		
				Cakupan terbentuknya Public Safety Center	100,00%	0,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
		3.1	Pengelolaan Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen sebaran tenaga kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.000.000.000		
		3.2	Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	67,50%	70%		80%	1.200.000.000	85%	2.450.000.000	90%	3.512.500.000	95%	3.600.312.500	95%	3.600.312.500		
		3.3	Kemitraan Palang Merah Indonesia (PMI)	Laporan pelaksanaan kegiatan operasional kemitraan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	102.500.000	1 dokumen	105.062.500	1 dokumen	108.939.062	1 dokumen	108.939.062		
		3.4	Kemitraan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)	Laporan pelaksanaan kegiatan operasional kemitraan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	102.500.000	1 dokumen	105.062.500	1 dokumen	107.689.063	1 dokumen	107.689.063		
		3.5	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	Laporan Penyelenggaraan BOK Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	700.000.000	1 dokumen	717.500.000	1 dokumen	735.437.500	1 dokumen	753.823.438	1 dokumen	753.823.438		
		3.6	Jaminan Persalinan	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin yang dilayani	85%	85%		85%	500.000.000	90%	512.500.000	95%	525.312.500	100%	538.445.312	100%	538.445.312		
		3.7	Pengelolaan BLUD Puskesmas Bulik	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	700.000.000	90%	717.500.000	95%	735.437.500	100%	753.823.438	100%	753.823.438		
		3.8	Pengelolaan BLUD Puskesmas Sematu	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	300.000.000	90%	307.500.000	95%	315.187.500	100%	323.067.188	100%	323.067.188		
		3.9	Pengelolaan BLUD Puskesmas Delang	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	400.000.000	90%	410.000.000	95%	420.250.000	100%	430.756.250	100%	430.756.250		
		3.10	Pengelolaan BLUD Puskesmas Tapin Bini	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	297.362.750	90%	304.796.819	95%	312.416.739	100%	320.227.158	100%	320.227.158		
		3.11	Pengelolaan BLUD Puskesmas Bayat	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	150.000.000	90%	153.750.000	95%	157.593.750	100%	161.533.594	100%	161.533.594		
		3.12	Pengelolaan BLUD Puskesmas Merambang	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	189.958.125	90%	194.707.078	95%	199.574.755	100%	204.564.124	100%	204.564.124		
		3.13	Pengelolaan BLUD Puskesmas Melata	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	300.000.000	90%	307.500.000	95%	315.187.500	100%	323.067.188	100%	323.067.188		
		3.14	Pengelolaan BLUD Puskesmas Kawa	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	190.547.500	90%	195.311.188	95%	200.193.967	100%	205.198.816	100%	205.198.816		
		3.15	Pengelolaan BLUD Puskesmas Arga Mulya	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	96.260.825	90%	98.667.346	95%	101.134.029	100%	103.662.380	100%	103.662.380		
		3.16	Pengelolaan BLUD Puskesmas Bukit Jaya	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	244.380.500	90%	250.490.013	95%	256.752.263	100%	263.171.069	100%	263.171.069		
		3.17	Pengelolaan BLUD Puskesmas Kinipan	Persentase capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	56,28	85%		85%	151.884.500	90%	155.681.612	95%	159.573.652	100%	163.562.994	100%	163.562.994		
		3.18	Pengelolaan SDM Kesehatan dan Perizinan	Jumlah laporan SDM Kesehatan dan Perizinan	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000		
		3.19	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Layanan Kegawatdaruratan	Jumlah laporan pelaksanaan Public Safety Center	0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	800.000.000	1 dokumen	806.250.000	1 dokumen	812.656.241	1 dokumen	819.222.647	1 dokumen	819.222.647		
				Cakupan layanan BLUD di Puskesmas Puskesmas	0%	0%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Cakupan puskesmas terakreditasi	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		4	Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengadaan Obat / Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	92%	94%		94%	3.270.000.000	94%	3.351.750.000	95%	3.935.543.750	95%	5.290.760.469	95%	5.290.760.469		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp	2022	Rp	2023	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.1	Pengelolaan Manajemen dan Pengawasan Obat, Perbekalan, alat kesehatan dan pangan	Cakupan pemeriksaan IRT dan sarana kesehatan berizin	60%	75%		78%	153.750.000	81%	157.593.750	84%	161.533.594	87%	165.571.934	87%	165.571.934	Kab. Laman dau	
		4.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Obat Tradisional	Cakupan pendataan kesehatan tradisional dan obat tradisional	60%	70%		75%	51.250.000	80%	52.531.250	85%	53.844.531	90%	55.190.645	90%	55.190.645		
		4.3	Pengelolaan dan Pengadaan Obat / Perbekalan Kesehatan	Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan dan analisa ketersediaan obat / perbekalan kesehatan	1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	3.065.000.000	2 dokumen	3.141.625.000	2 dokumen	3.720.165.625	2 dokumen	5.069.997.891	2 dokumen	5.069.997.891		
		5	Program Manajemen Kesehatan, Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Rasio puskesmas, poskesdes dan pusat persatuan penduduk	1,9	2,11		2,11	4.965.222.749	2,11	5.911.242.685	2,11	6.762.386.225	2,11	8.054.534.778	2,11	8.054.534.778	Sekretariat	
		5.1	Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	4.765.222.749	1 dokumen	5.706.242.685	1 dokumen	6.552.261.225	1 dokumen	7.839.156.653	1 dokumen	7.839.156.653		
				Cakupan sarana roda empat yang dalam kondisi baik	50%	60%		70%		80%		90%		95%		95%			
		5.2	Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Informasi Kesehatan	Jumlah Profil Kesehatan Kabupaten yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	210.125.000	1 dokumen	215.378.125	1 dokumen	215.378.125		
				Jumlah Laporan Akhir Tahun Bidang Kesehatan (LPPD, LKPJ)	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
		6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.349.054.005	100%	4.627.500.000	100%	4.655.687.500	100%	4.682.501.050	100%	4.708.406.289	100%	4.708.406.289	Sekretariat	
		6.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Penyediaan jasa surat menyurat	100%	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.150.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000		
		6.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	144.425.000	100%	150.425.000	100%	154.185.625	100%	155.000.000	100%	160.906.289	100%	160.906.289		
		6.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	253.649.843	100%	245.513.000	100%	251.650.825	100%	255.000.000	100%	255.000.000	100%	255.000.000		
		6.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	100%	3.250.140.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000		
		6.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	100%	97.512.000	100%	167.000.000	100%	171.175.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000		
		6.6	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	33.713.125	100%	38.000.000	100%	38.950.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000		
		6.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	20.250.000	100%	20.000.000	100%	20.500.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000		
		6.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	6.550.000	100%	6.000.000	100%	6.150.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000		
		6.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	16.638.304	100%	17.000.000	100%	17.425.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000		
		6.10	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan penyediaan makanan / minuman	100%	100%	52.500.000	100%	55.000.000	100%	56.375.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000		
		6.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	-	335.905.733	100%	297.562.000	100%	305.001.050	100%	305.001.050	100%	310.000.000	100%	310.000.000		
				Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	12 bulan										0%	0		
		6.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100%	-	131.770.000	100%	125.000.000	100%	128.125.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000		
				Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan		-		-		-		-		-			
		7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	284.551.577	100%	325.000.000	100%	333.125.000	100%	340.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000		
				Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		-		-		-		-		-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp	2022	Rp	2023	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan pelaksanaan perlengkapan gedung kantor	100%	-	118.911.577	100%	120.000.000	100%	123.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	Sekretariat	
				Pelaksanaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan		-		-		-		-		-			
		7.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	-	165.640.000	100%	205.000.000	100%	210.125.000	100%	215.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000		
				Pelaksanaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	12 bulan		-		-		-		-		-			
		8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	90%	0	0	90%	150.000.000	90%	153.750.000	90%	156.188.012	90%	165.000.000	90%	165.000.000	Sekretariat	
		8.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Cakupan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	100%	52.250.000	100%	53.556.250	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000		
		8.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Cakupan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	0	100%	97.750.000	100%	100.193.750	100%	101.188.012	100%	105.000.000	100%	105.000.000		
		9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75%	-	55.000.000	80%	100.000.000	80%	102.500.000	80%	110.000.000	80%	110.000.000	80%	110.000.000	Sekretariat	
				Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan tenaga kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		-		-		-		-		-			
		9.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Cakupan pendidikan dan pelatihan formal	100%	-	55.000.000	100%	100.000.000	100%	102.500.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000		
				Jumlah pelaksanaan kegiatan	10 kali	10 kali		-		-		-		-		-			
		10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah pengadaan obat dan alat kesehatan	10 Paket	10 Paket	3.966.090.250											PSDM K	
		10.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah pengadaan obat dan alat kesehatan	8 Paket	10 Paket	3.966.090.250	-		-		-		-		-			
		11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	501,79	306,00	10.018.424.750											Kesmas	
		11.1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk miskin	12 bulan	12 bulan	1.257.716.000	-		-		-		-		-			
		11.2	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Pelaksanaan kegiatan	12 bulan	12 bulan	100.500.000	-		-		-		-		-			
		11.3	Penilaian tenaga kesehatan teladan	Pelaksanaan kegiatan	1 kali	1 kali	40.388.750	-		-		-		-		-			
		11.4	Pengelolaan Gudang Farmasi	Operasional gudang farmasi	12 bulan	12 bulan	61.560.000	-		-		-		-		-			
		11.5	Pengelolaan Puskesmas Bulik	Operasional Puskesmas Bulik	12 bulan	12 bulan	916.896.700	-		-		-		-		-			
		11.6	Pengelolaan Puskesmas Sematu	Operasional Puskesmas Sematu	12 bulan	12 bulan	733.517.200	-		-		-		-		-			
		11.7	Pengelolaan Puskesmas Delang	Operasional Puskesmas Delang	12 bulan	12 bulan	641.827.600	-		-		-		-		-			
		11.8	Pengelolaan Puskesmas Tapin Bini	Operasional Puskesmas Tapin Bini	12 bulan	12 bulan	733.517.200	-		-		-		-		-			
		11.9	Pengelolaan Puskesmas Kinipan	Operasional Puskesmas Kinipan	12 bulan	12 bulan	733.517.200	-		-		-		-		-			
		11.10	Pengelolaan Puskesmas Bayat	Operasional Puskesmas Bayat	12 bulan	12 bulan	825.206.900	-		-		-		-		-			
		11.11	Pengelolaan Puskesmas Merambang	Operasional Puskesmas Merambang	12 bulan	12 bulan	733.517.200	-		-		-		-		-			
		11.12	Pengelolaan Puskesmas Melata	Operasional Puskesmas Melata	12 bulan	12 bulan	733.517.200	-		-		-		-		-			
		11.13	Pengelolaan Labkesda	Operasional Labkesda	12 bulan	12 bulan	78.900.000	-		-		-		-		-			
		11.14	Pengelolaan Puskesmas Kawa	Operasional Puskesmas Kawa	12 bulan	12 bulan	641.827.600	-		-		-		-		-			
		11.15	Pengelolaan Puskesmas Arga Mulya	Operasional Puskesmas Arga Mulya	12 bulan	12 bulan	641.827.600	-		-		-		-		-			
		11.16	Pengelolaan Puskesmas Bukit Jaya	Operasional Puskesmas Bukit Jaya	12 bulan	12 bulan	641.827.600	-		-		-		-		-			
		11.17	Pemuktahiran Data Pegawai	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	9.360.000	-		-		-		-		-			
		11.18	Dukungan Manajemen Puskesmas	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	493.000.000	-		-		-		-		-			
		12	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah laporan pengawasan pangan dan obat tradisional	2 dokumen	2 dokumen	61.800.000											PSDM K	
		12.1	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	21.800.000	-		-		-		-		-			
		12.2	Inventarisasi dan Pemetaan Tanaman Obat Tradisional Asli Daerah	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	40.000.000	-		-		-		-		-			
		13	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan pengadaan media promosi	1 dokumen	1 dokumen	46.000.000											Kesmas	
		13.1	Pengembangan Media Informasi	Pelaksanaan kegiatan	1 kali	1 kali	46.000.000	-		-		-		-		-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp	2022	Rp	2023	Rp	Target	Rp			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		14	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita penerima PMT	50%	60%	91.000.000											Kesm		
		14.1	Pemberian makanan tambahan	Jumlah pengadaan makanan tambahan	1 paket	1 paket	91.000.000	-		-		-		-		-				
		15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa / kelurahan UCI	92%	94%	640.506.250											P3		
		15.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Pelaksanaan kegiatan	2 kali	2 kali	39.500.000	-		-		-		-		-				
		15.2	Peningkatan Imunisasi	Pelaksanaan imunisasi di puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas	109.790.000	-		-		-		-		-				
		15.3	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	50.450.000	-		-		-		-		-				
		15.4	Pemberantasan Penyakit Filariasis	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	239.858.000	-		-		-		-		-				
		15.5	Penanggulangan P2 Kusta	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	15.800.000	-		-		-		-		-				
		15.6	Pemberantasan Penyakit Tidak Menular	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	30.000.000	-		-		-		-		-				
		15.7	Penanggulangan Malaria	Penanggulangan malaria di puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas	47.360.000	-		-		-		-		-				
		15.8	Penanggulangan Kasus TBC	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	67.748.250	-		-		-		-		-				
		15.9	Pencegahan dan penanggulangan orang dengan gangguan jiwa	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	40.000.000	-		-		-		-		-				
		16	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas, poskesdes dan puskesmas persatuan penduduk	1,90	1,90	3.093.170.680													Sekre
		16.1	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah pengadaan roda empat	1 unit	1 unit	750.000.000	-		-		-		-		-				
		16.2	Pembangunan/Rehap Puskesmas	Pelaksanaan pembangunan / rehap puskesmas	100%	100%	2.343.170.680	-		-		-		-		-				
		17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah dokumen AMP	1 dokumen	1 dokumen	42.400.000													Kesm
		17.1	Pertemuan AMP	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	42.400.000	-		-		-		-		-				asy
		18	Program Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Jumlah dokumen profil kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	572.096.156													Sekre
		18.1	Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Jumlah dokumen profil dan laporan evaluasi	4 dokumen	4 dokumen	97.000.000	-		-		-		-		-				
		18.2	Pendampingan dan Pembinaan Lomba Posyandu, Lomba P2WKSS dan Lomba Desa	Pelaksanaan kegiatan	1 kali	1 kali	21.250.000	-		-		-		-		-				
		18.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah paket SIK	1 paket	1 paket	293.846.156	-		-		-		-		-				
		18.4	Monitoring dan evaluasi perencanaan dan keuangan	Pelaksanaan movev	12 Bulan	12 Bulan	160.000.000	-		-		-		-		-				
		19	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas terakreditasi	10 PKM	1 PKM	6.186.809.050													PSDM
		19.1	Kemitraan Palang Merah Indonesia (PMI)	Pelaksanaan kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100.000.000	-		-		-		-		-				K
		19.2	Kemitraan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)	Pelaksanaan kegiatan	2 laporan	2 laporan	100.000.000	-		-		-		-		-				
		19.3	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	Operasional BOK Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	907.000.000	-		-		-		-		-				
		19.4	Akreditasi Puskesmas	Pelaksanaan akreditasi	10 PKM	1 PKM	1.162.273.000	-		-		-		-		-				
		19.5	Jaminan Persalinan	Pelaksanaan jampersal	12 Bulan	12 Bulan	551.000.000	-		-		-		-		-				
		19.6	Pengelolaan BLUD Puskesmas Bulik	Operasional BLUD	12 Bulan	12 Bulan	775.450.000	-		-		-		-		-				
		19.7	Pengelolaan BLUD Puskesmas Sematu	Operasional BLUD	12 Bulan	12 Bulan	239.397.100	-		-		-		-		-				
		19.8	Pengelolaan BLUD Puskesmas Delang	Operasional BLUD	12 Bulan	12 Bulan	465.813.000	-		-		-		-		-				
		19.9	Pengelolaan BLUD Puskesmas Tapin Bini	Operasional BLUD	12 Bulan	12 Bulan	290.110.000	-		-		-		-		-				
		19.10	Pengelolaan BLUD Puskesmas Bayat	Operasional BLUD	12 Bulan	12 Bulan	145.700.950	-		-		-		-		-				
		19.11	Pengelolaan BLUD Puskesmas Merambang	Operasional BLUD	12 Bulan	12 Bulan	185.325.000	-		-		-		-		-				
		19.12	Pengelolaan BLUD Puskesmas Melata	Operasional BLUD	12 Bulan	12 Bulan	335.072.000	-		-		-		-		-				
		19.13	Pengelolaan BLUD Puskesmas Kawa	Operasional BLUD	12 Bulan	12 Bulan	185.900.000	-		-		-		-		-				
19.14		Pengelolaan BLUD Puskesmas Arga Mulya	Operasional BLUD	12 Bulan	12 Bulan	93.913.000	-		-		-		-		-					
19.15	Pengelolaan BLUD Puskesmas Bukit Jaya	Operasional BLUD	12 Bulan	12 Bulan	238.420.000	-		-		-		-		-						
19.16	Manajemen E-Logistik	Pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	150.755.000	-		-		-		-		-						
19.17	Beasiswa Tenaga Kesehatan	Penerima beasiswa	0 orang	120 orang	112.500.000	-		-		-		-		-						
19.18	Pengelolaan BLUD Puskesmas Kinipan	Operasional BLUD	12 Bulan	12 Bulan	148.180.000	-		-		-		-		-						
JUMLAH							29.406.902.718		31.906.489.449		34.618.541.052		37.561.117.042		40.753.811.990		40.753.811.990			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN RENSTRA

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau 2018 - 2023 :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 -2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Usia Harapan Hidup	68,98 tahun	69,40 tahun	69,60 tahun	69,80 tahun	70,00 tahun	70,20 tahun	70,20 tahun
2	Cakupan Kesehatan Masyarakat	56,37%	60%	65%	70%	80%	90%	90%
3	Cakupan Pelayanan Penyakit	75%	85%	85%	90%	95%	95%	95%
4	Cakupan Akses dan Mutu Kesehatan	65%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5	Cakupan 1 desa 2 tenaga kesehatan	67,5%	67,5%	80%	85%	90%	95%	95%
6	Cakupan terbentuknya Public Safety Center	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan.

Kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang sudah disusun, pelaksanaan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 menjadi tanggung jawab bersama dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Rencana Strategis ini merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem nasional lainnya dalam suatu suprasistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan. Oleh karena itu tidak tertutup terhadap penyesuaian dan penyempurnaan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2018 - 2023 ini sangat bergantung pada semangat, dedikasi, ketekunan, kerja keras, kemampuan dan ketulusan para penyelenggara, serta sangat bergantung pula pada petunjuk, rahmat, dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

**FORMULATORIUM PERHITUNGAN INDIKATOR KESEHATAN DALAM RENSTRA
DINAS KESEHATAN KAB. LAMANDAU 2018 - 2023**

INDIKATOR	FORMULA
Angka Usia Harapan Hidup	Rilis dari Badan Pusat Statistik
Cakupan Kesehatan Masyarakat	Penjumlahan dari (Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil + Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin + Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir + Persentase pelayanan kesehatan balita + Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif + Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut + Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar) DIBAGI dengan 7 DIKALI 100. Hasil dalam persen
Cakupan Pelayanan Penyakit	Penjumlahan dari (Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi + Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus + Persentase pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat + Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB + Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV) DIBAGI dengan 5 DIKALI 100. Hasil dalam persen
Cakupan Akses dan Mutu Kesehatan	Penjumlahan dari (Cakupan layanan BLUD di Puskesmas Puskesmas + Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan + Cakupan pemeriksaan IRT dan sarana kesehatan berizin + Cakupan puskesmas terakreditasi + Cakupan 1 desa 2 tenaga kesehatan) DIBAGI dengan 5 DIKALI DIKALI 100. Hasil dalam persen